



RENJA TAHUN 2022

***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG***

**Jln. Dr. Sutomo Nomor : 33 Kel. Pasiran / Kec. Singkawang Barat
Telp.(0562) 638342/Fax.(0562) 638519**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan rencana. RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut diatas RENJA sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2022.

Singkawang, 2 Juni 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Singkawang



DESON LINGGA, SH
NIP. 19630110 198303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	19
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	19
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	26
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	28
2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	34
2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	45
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD	46
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	46
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD	47
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	59
BAB V. PENUTUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek yaitu satu tahun kedepan. RENJA Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi RENJA tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran RENJA serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan demikian RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Tahunan (LKT).



Penyusunan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi RENJA tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), serta berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.



Susunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Singkawang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan; dan :
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan
Pewarganegaraan;

**e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
terdiri atas :**

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas :

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki tugas untuk membantu Walikota Singkawang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Singkawang tahun 2018-2022 yaitu “ **SINGKAWANG HEBAT 2022** “.

Tahun Anggaran 2021 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



-
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai macam inovasi demi mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat dengan membangun penguatan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban serta pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang baik;



- d. Meningkatkan kuantitas/kualitas sarana dan prasarana kerja guna memenuhi standar pelayanan prima;
- e. Meningkatkan kualitas Tata Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis Teknologi Informasi;
- f. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (*tentang Capaian Indikator Program dan Kegiatan*)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.



Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

[illegible]

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.



Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota												
No	Indikator	Sub-Indikator	Nilai	Tahun Berjalan (Bulan-Tahun)				Tahun Berjalan		Tahun Berjalan		Catatan
				Tahun Berjalan		Tahun Berjalan		Tahun Berjalan				
				Tahun Berjalan	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (hasil analisis dari sub bab sebelumnya)

Berisikan uraian mengenai:

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut.



Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;



2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepanitiaan Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Kategori	Kualifikasi Jenis	Manusia/ Waktu	Estimasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.



3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ☐ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - ☐ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - ☐ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Hasil Pengerjaan Tabel sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Kegiatan				Rencana Anggaran		
			No	Nama Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran	No	Nama Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2021	
					Target RENJA PD Th. 2020	Realisasi RENJA PD Th. 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021 (TW-Ke 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.06.01.	Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%							
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja PD	100%	1 Dokumen Renja PD	1 Dokumen Renja PD	100%	1 Dokumen Renja PD	300%	100%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	300%	100%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%							
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan	58 Orang	-	-	-	-	58 Orang	25%	25%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	25%	25%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	200%	0%



2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	25%	45%
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	100%	-	-	-	-	100%	25%	45%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%							
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kursi Kerja 11 Unit, Lemari Kaca 2 Unit, Gorden 46.5 M ² , Kursi Rapat 30 Unit, dan Meja	-	-	-	-	Kursi Kerja 11 Unit, Lemari Kaca 2 Unit, Gorden 46.5 M ² , Kursi Rapat 30 Unit, dan Meja Rapat 1 Unit	0%	0%
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	AC 2 PK 4 Unit, Komputer Pc All in One 7 Unit, Mesin Printer All In One 10 Unit, Laptop 4 Unit, Scanner 1 Unit, Server SIAK 1 Unit dan Mesin Printer Warna Kartu Identitas Anak (KIA) 2 Unit	-	-	-	-	AC 2 PK 4 Unit, Komputer Pc All in One 7 Unit, Mesin Printer All In One 10 Unit, Laptop 4 Unit, Scanner 1 Unit, Server SIAK 1 Unit dan Mesin Printer Warna Kartu Identitas Anak (KIA) 2 Unit	0%	0%



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%					100%	225%	45%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	65%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mesin / Kartu Absensi yang diadakan	100%		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	80%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	71 Unit	-	-	-	-	71 Unit	0%	0%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang	4 Kali	-	-	-	-	4 Kali	0%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
	Kegiatan Penataan Organisasi		100%							
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola	Jumlah Buku Laporan Hasil survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0%	0%
	2. Program Pendaftaran Penduduk									
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	100%							



	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang melakukan Perekaman KTP-el, Jumlah KK, KTP-el dan KIA yang diterbitkan	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA	-	-	-	-	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 6.000	0%	0%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang lakukan perekaman KTP-elektronik	5.000 Orang	-	-	-	-	5.000 Orang	0%	0%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah Penerbitan KK dan KTP-el Perubahan Biodata	1.510 KK, 901 KTP-el, dan 350 KIA	-	-	-	-	1.510 KK, 901 KTP-el, dan 350 KIA	0%	0%
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK, KTP-el Pindah Datang dan Pindah Keluar	KK Pindah Datang 3.020, KK Pindah	-	-	-	-	KK Pindah Datang 3.020, KK Pindah Keluar	0%	0%
	3. Program Pencatatan Sipil									
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	45%
	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas	610 Dok atas perkawinan, 18 Dok Akta	-	-	-	-	610 Dok atas perkawinan, 18 Dok Akta	0%	0%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	4.790 Dokumen Akta Kelahiran, 170 Dokumen Akta Kematian dan 250 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta)	-	-	-	-	4.790 Dokumen Akta Kelahiran, 170 Dokumen Akta Kematian dan 250 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta Kelahiran)	0%	0%
	4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									



	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Penyajian Database Kependudukan	100%							
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Aplikasi dan perangkat SIAK yang dipelihara	100%	-	-	-	-	100%	0%	0%
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama	5 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	-	-	-	-	5 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	0%	0%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, Buku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100%	200%	50%
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	100%							
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	5 Modul Aplikasi Data Warehouse	-	-	-	-	5 Modul Aplikasi Data Warehouse dan 1 Aplikasi	0%	0%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	Jumlah Peserta Rakor Pemanfaatan Data dan	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	0%	0%
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan	110 Orang	-	-	-	-	110 Orang	0%	0%
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Peserta BIMTEK Tenaga pengelola SIAK	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	0%	0%
	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat	Jumlah Laporan Buku Statistik Kependudukan dan	14 Buku	-	-	-	-	14 Buku	0%	0%
	5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan									



	Penyusunan Profil kependudukan	Persentase penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang	100%							
	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah laporan data kependudukan yang diakses oleh lembaga pengguna	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	0%	0%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun	1 Buku	-	-	-	-	1 Buku	0%	0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah tertuang didalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Ada 4 Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah dibawah ini.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Capaian TW ke-1 s/d 31 Maret Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	-	-	92%	94%	96%	100%	97,97%	0%	100%	0%	
2	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	-	-	83%	87%	92%	97%	98,03%	0%	97%	0%	
3	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	-	85%	87,50%	90%	92,50%	88,69%	0%	92,50%	0%	
4	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	-	30%	40%	50%	70%	37,04%	0%	70%	0%	

(**) Data hasil pencetakan dari Pusat.

(**) Data DKB kondisi 31 Januari 2021



2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Isu-isu selalu berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi suatu institusi, baik lingkup internal maupun eksternal. Isu-isu strategis dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu perlu disikapi dan dikaji untuk keberlangsungan penyelenggaraan roda organisasi.

Isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Isu-Isu Strategis dimaksud memerlukan perhatian, karena terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



1. Capaian kepemilikan KTP elektronik masih dibawah 100%

Program Nasional tentang Penerapan KTP elektronik dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini bersifat massal dan langsung dikendalikan dari Kementerian Dalam Negeri atau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP elektronik yang tercetak.

Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP elektronik dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tetap berwenang untuk pengadaan blanko KTP elektronik, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP elektronik ke masing-masing Kabupaten/Kota.

Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun 2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP SIAK atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 dan AFIS Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Kondisi 8 Januari 2015 s/d 31 Desember 2020 capaian perekaman dan kepemilikan KTP elektronik adalah sebagai berikut :

- Jumlah penduduk Kota Singkawang sebanyak : 238.483 Jiwa.
- Jumlah penduduk wajib KTP : 165.777 Jiwa.
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik : 162.508 Jiwa (98,03%).
- Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman : 163.777 Jiwa (98,55%).
- Jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman : 2.400 (1,45%).

KTP elektronik merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau Warga Negara Indonesia selain sebagai bukti diri sebagai Warga Negara Indonesia juga sebagai dasar diri bagi penduduk untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan dari negara, maka KTP elektronik merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan kepemilikan KTP elektronik idealnya adalah 100%. dalam hal, apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, ini adalah merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.



Cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kota Singkawang sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar 98,03%. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terhentinya pelayanan perekaman KTP-elektronik karena penerapan protokol kesehatan, serta tidak terlaksanakannya pelayanan keliling/jemput bola akibat dampak dari Pandemi wabah Covid-19.
2. Jumlah Wajib KTP-el selalu bertambah setiap harinya seiring dengan bertambahnya usia penduduk dari usia 16 ke 17 Tahun.
3. Peralatan yang kurang memadai, perlunya peremajaan terutama peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.

2. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga yang data perseorangannya masih kurang valid.

Data kependudukan perseorangan diperlukan untuk pemetaan golongan penduduk suatu wilayah/daerah. Data-data ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Data kependudukan perseorangan penduduk di Kota Singkawang disinyalir masih banyak yang kurang akurat dan valid, KK Count:0 adalah KK dengan blanko/terbitan lama, KK dengan data belum update, meragukan, dan lain-lain. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk atau masyarakat untuk memperbaharui elemen data KK nya dengan data terbaru.



3. Masih rendahnya Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.

Masih tingginya jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran, dikarenakan oleh berbagai faktor. Berdasarkan Data Hasil Pelayanan SIAK Periode Desember 2020 dan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2020 menunjukkan masih banyak penduduk yang belum mempunyai atau melaporkan kepemilikan Akta Kelahirannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun sebanyak : 81.198 Orang.
- Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran : 72.012 Orang (88,69%).
- Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang tidak/belum memiliki Akta Kelahiran : 9.186 Orang (11,31%).

4. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid.

Data Kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kota Singkawang sampai saat ini dikarenakan antara lain :

- Masih ada jumlah data penduduk ganda dan anomali;
- Belum terbangun koneksitas data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Pengadilan Agama dan KUA,



sehingga data perkawinan di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke Database SIAK;

- Belum terbangun kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Singkawang. Perjanjian Kerjasama ini terkait pembuatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-60 hari serta Akta Kematian dan perubahan Kartu Keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya Peristiwa Kependudukan di Kota Singkawang.
- Belum terbangun kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, sehingga pendidikan terakhir antara Izajah dan Kartu Keluarga yang dimiliki masyarakat tidak sesuai, dikarenakan sedikit sekali masyarakat yang mau melaporkan perubahan pendidikannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
- Juga secara faktual masih cukup banyak ditemukan Penduduk Rentan yang notabene belum punya NIK dan atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum terakumulasi kedalam Database SIAK.

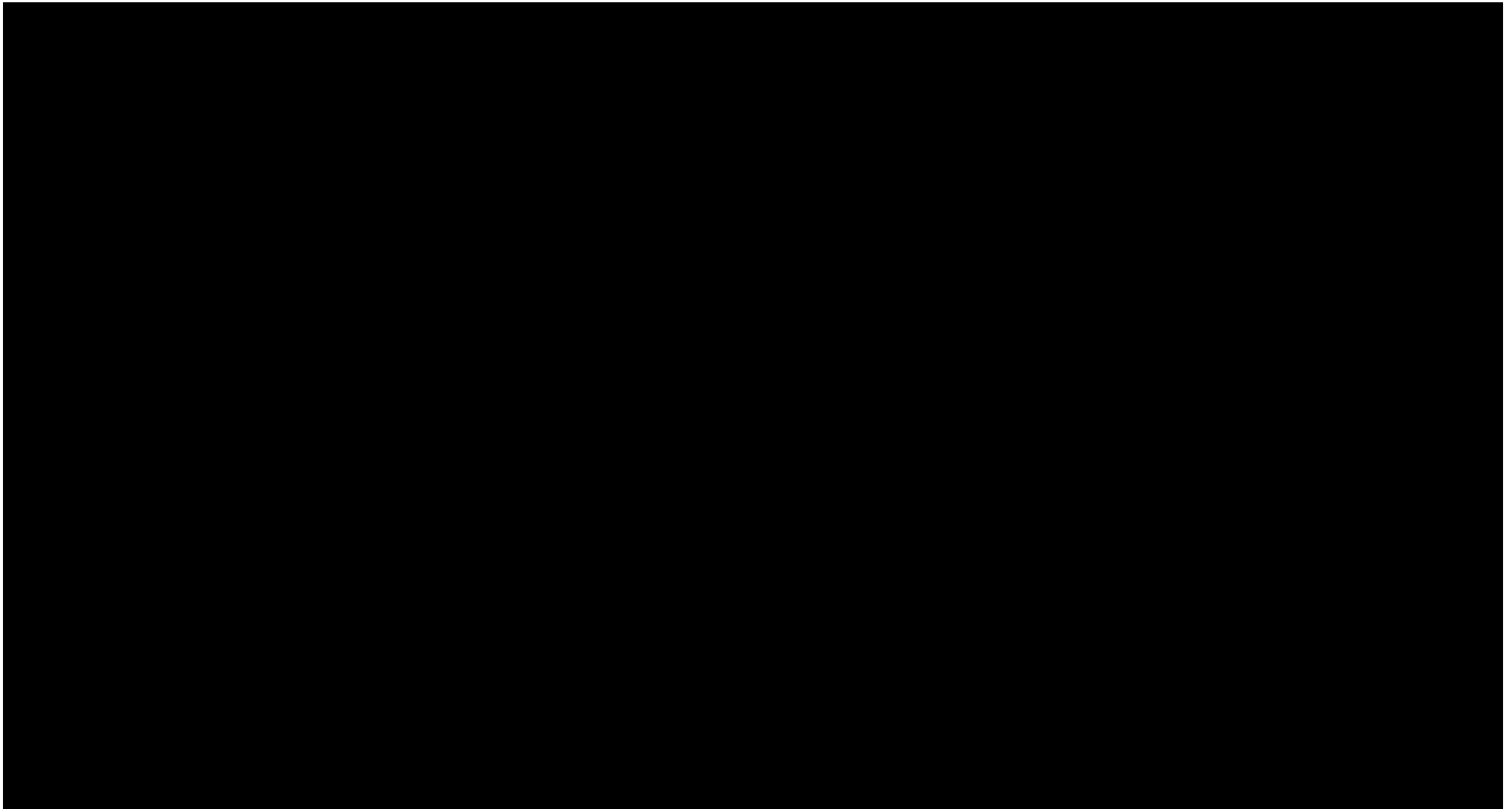
Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain sebagai berikut:

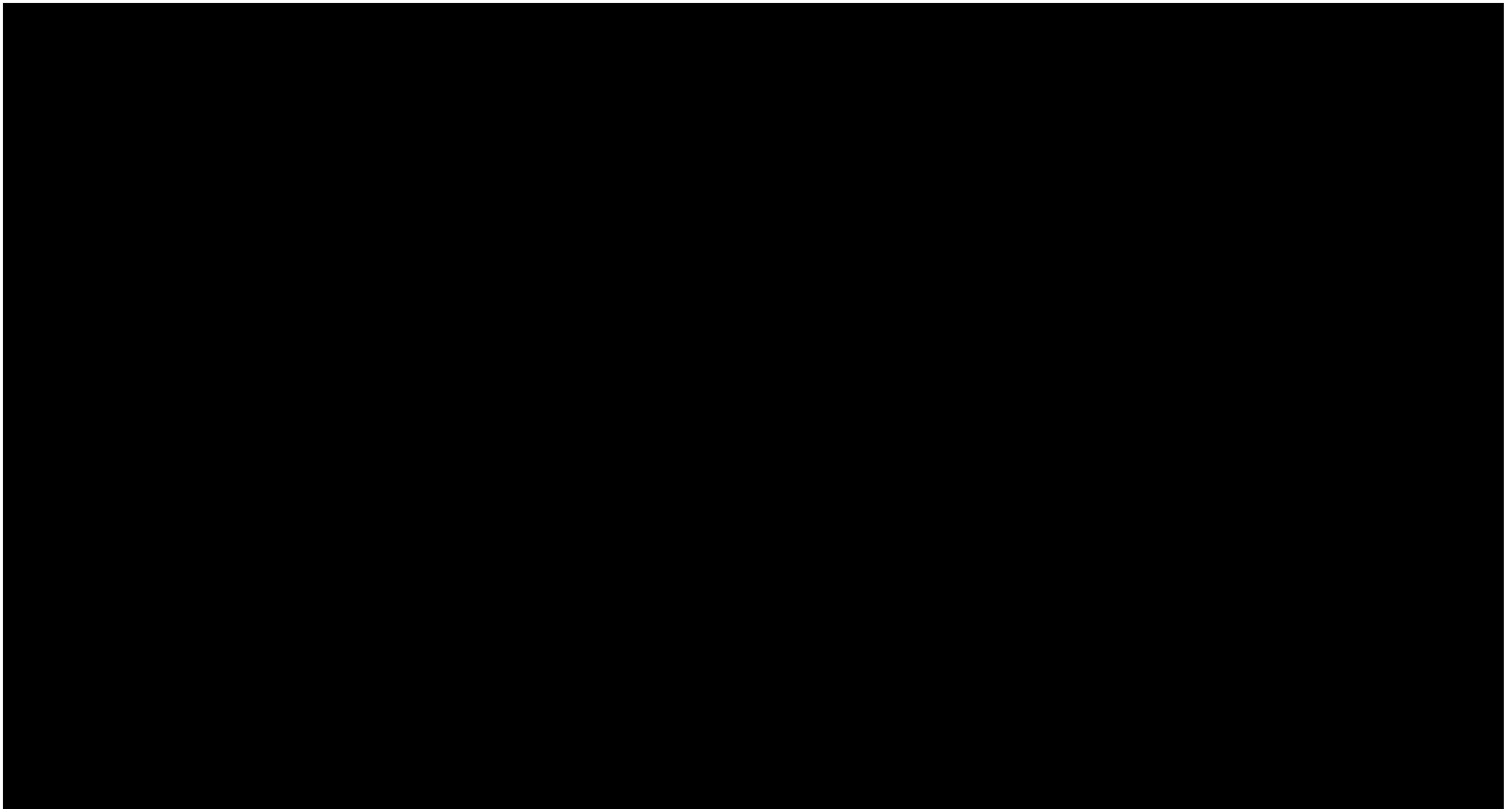


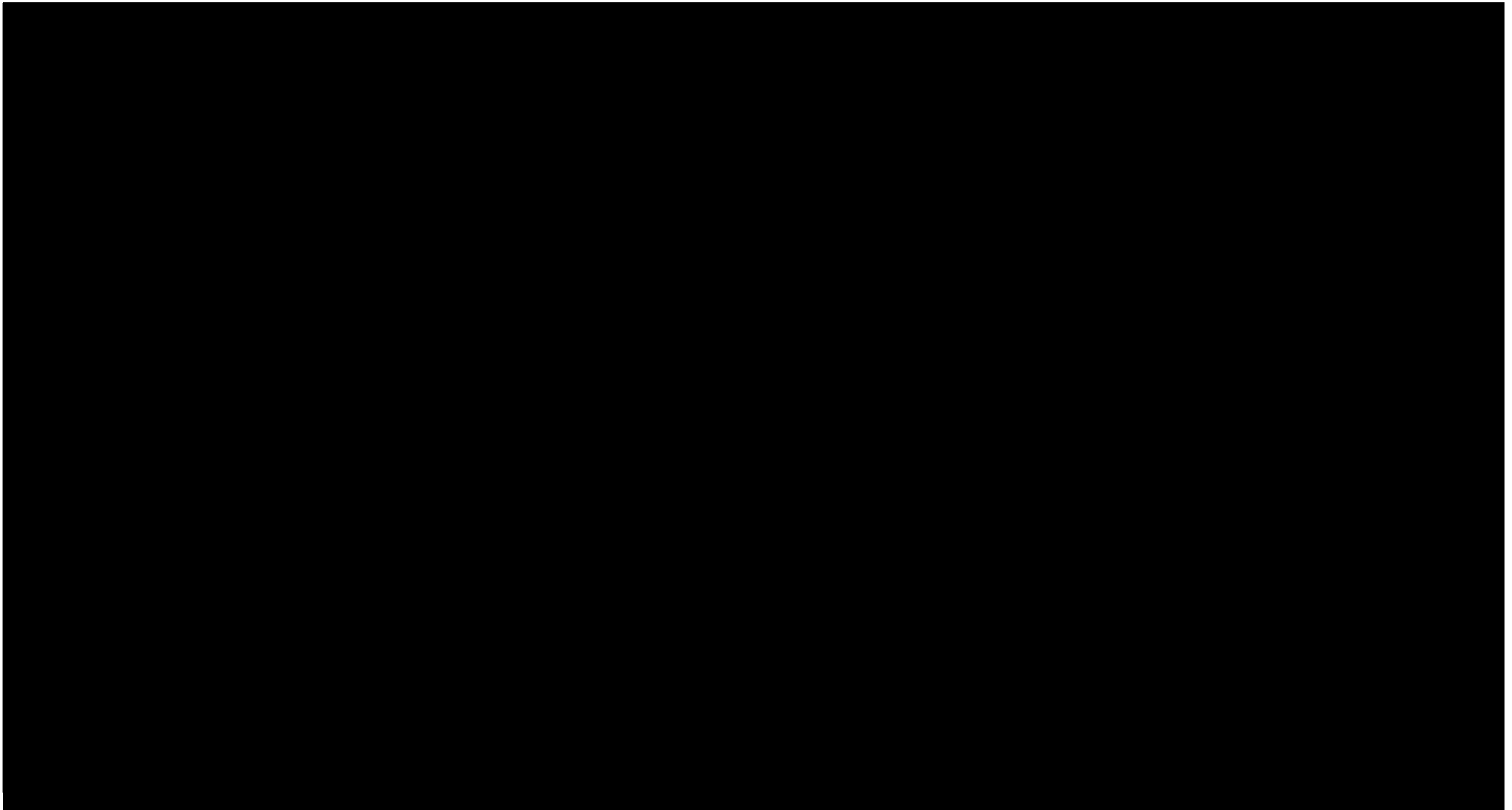
1. Masih banyak ditemukan data ganda dan anomali;
2. Penduduk wajib ber-KTP belum semuanya memiliki KTP;
3. Masih banyak penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran;
4. Sarana, Prasarana dan Sistem Administrasi Kependudukan yang kurang memadai;
5. Kesadaran penduduk untuk melaporkan perubahan data yang dialaminya masih sangat rendah;
6. Sebagian besar Perangkat Daerah belum mengetahui peranan data kependudukan;
7. Terkendalanya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat dari Pandemi Wabah Covid-19.

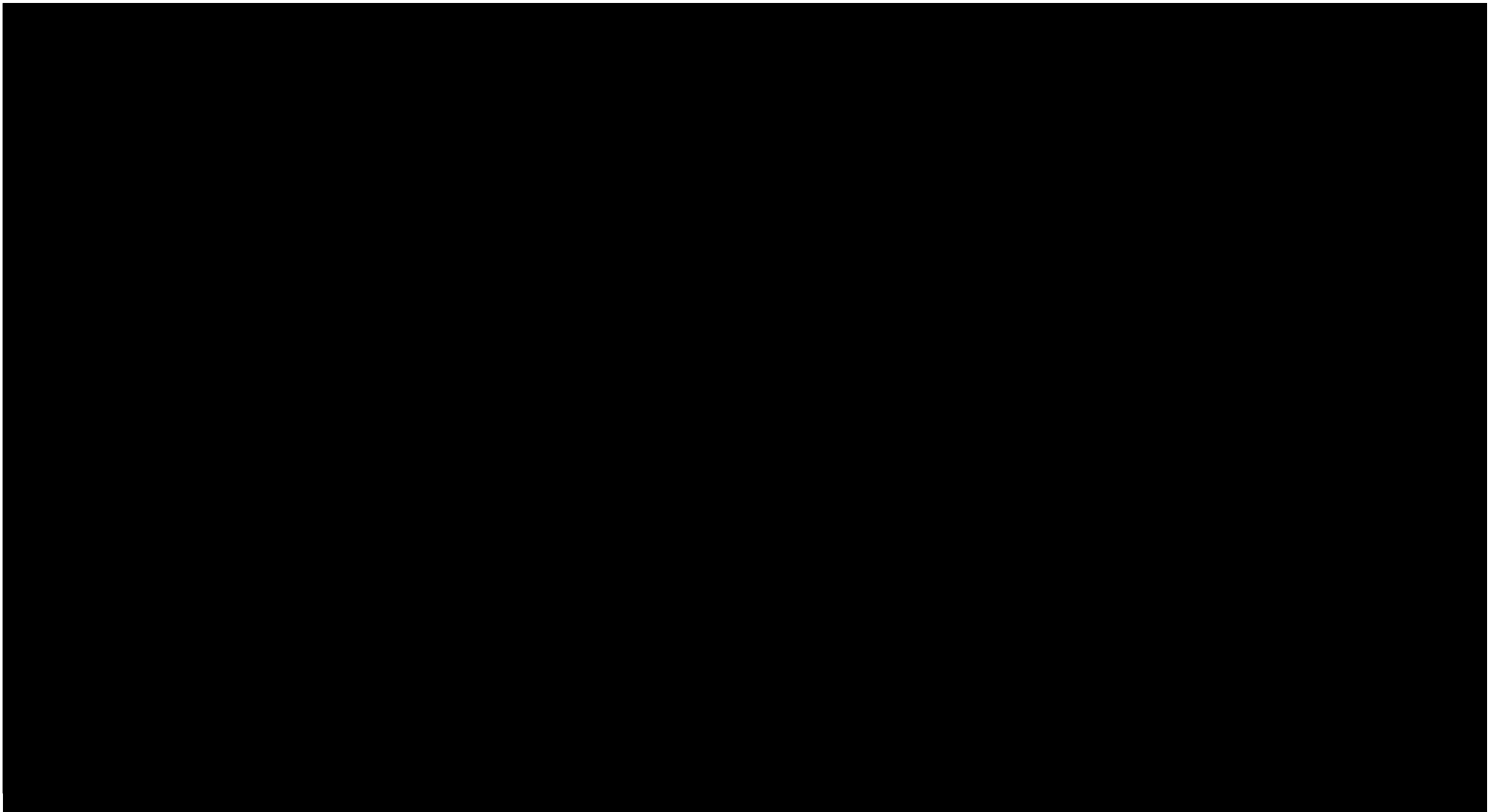
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

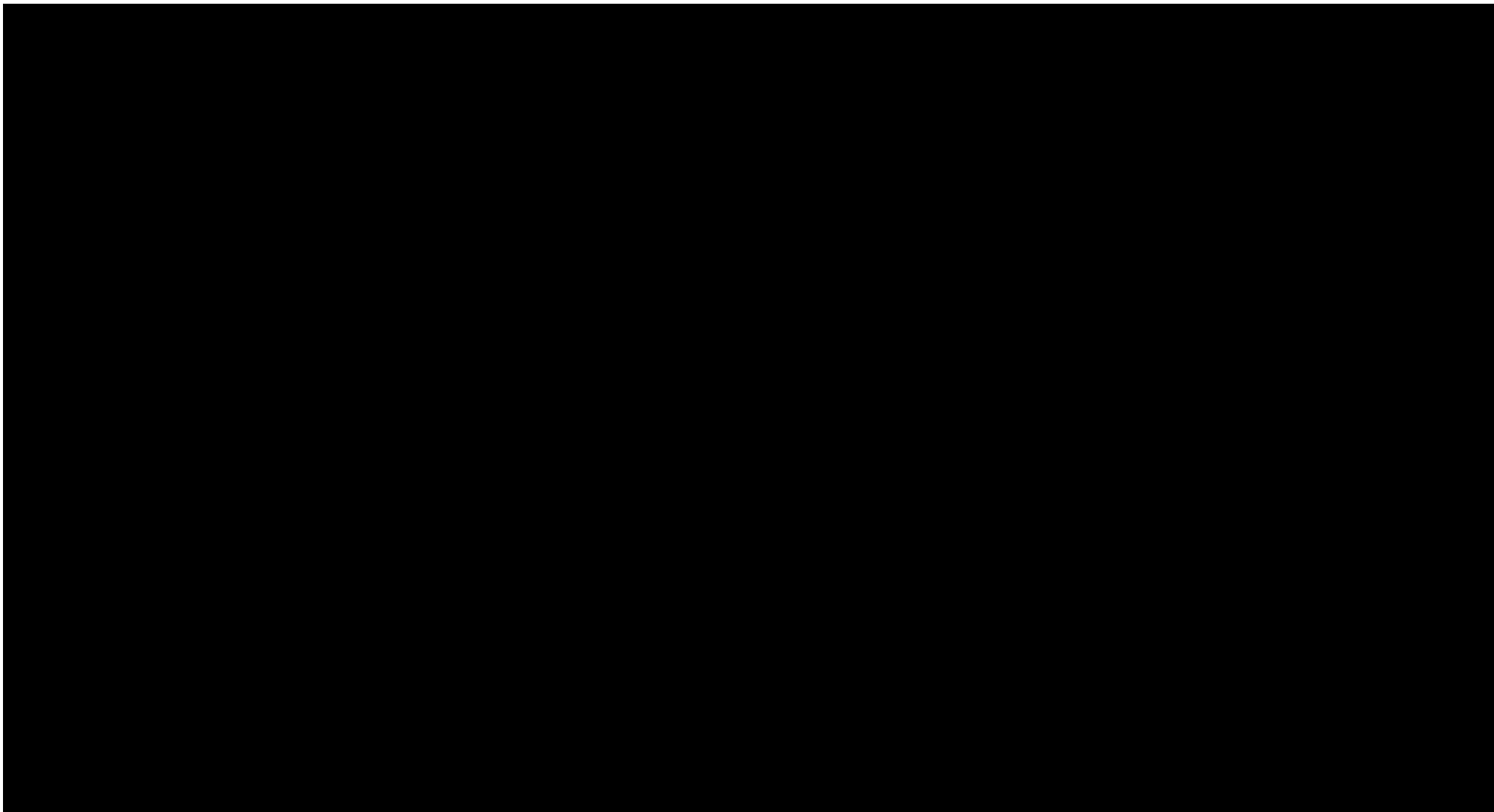
Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang secara keseluruhan, hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

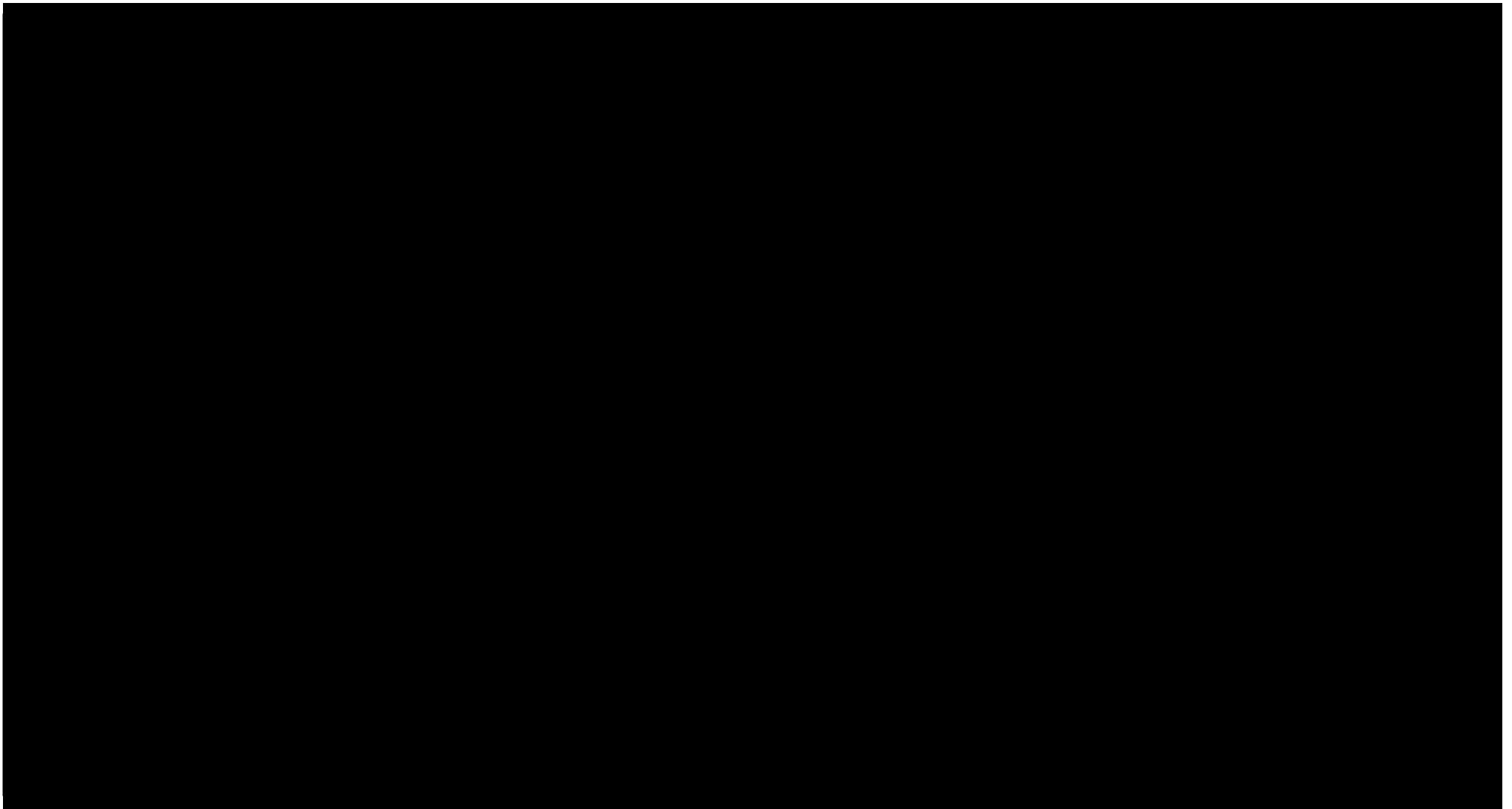


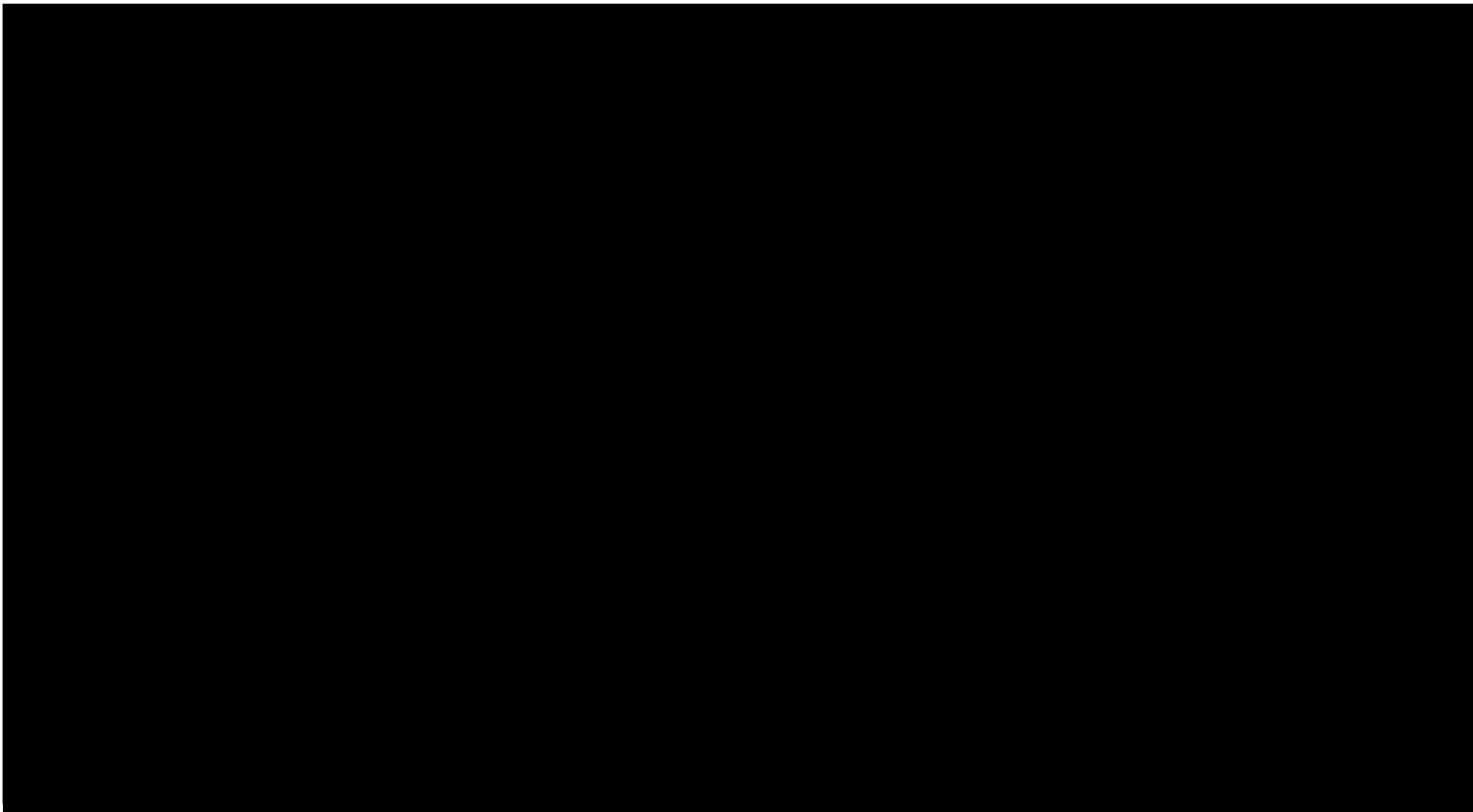


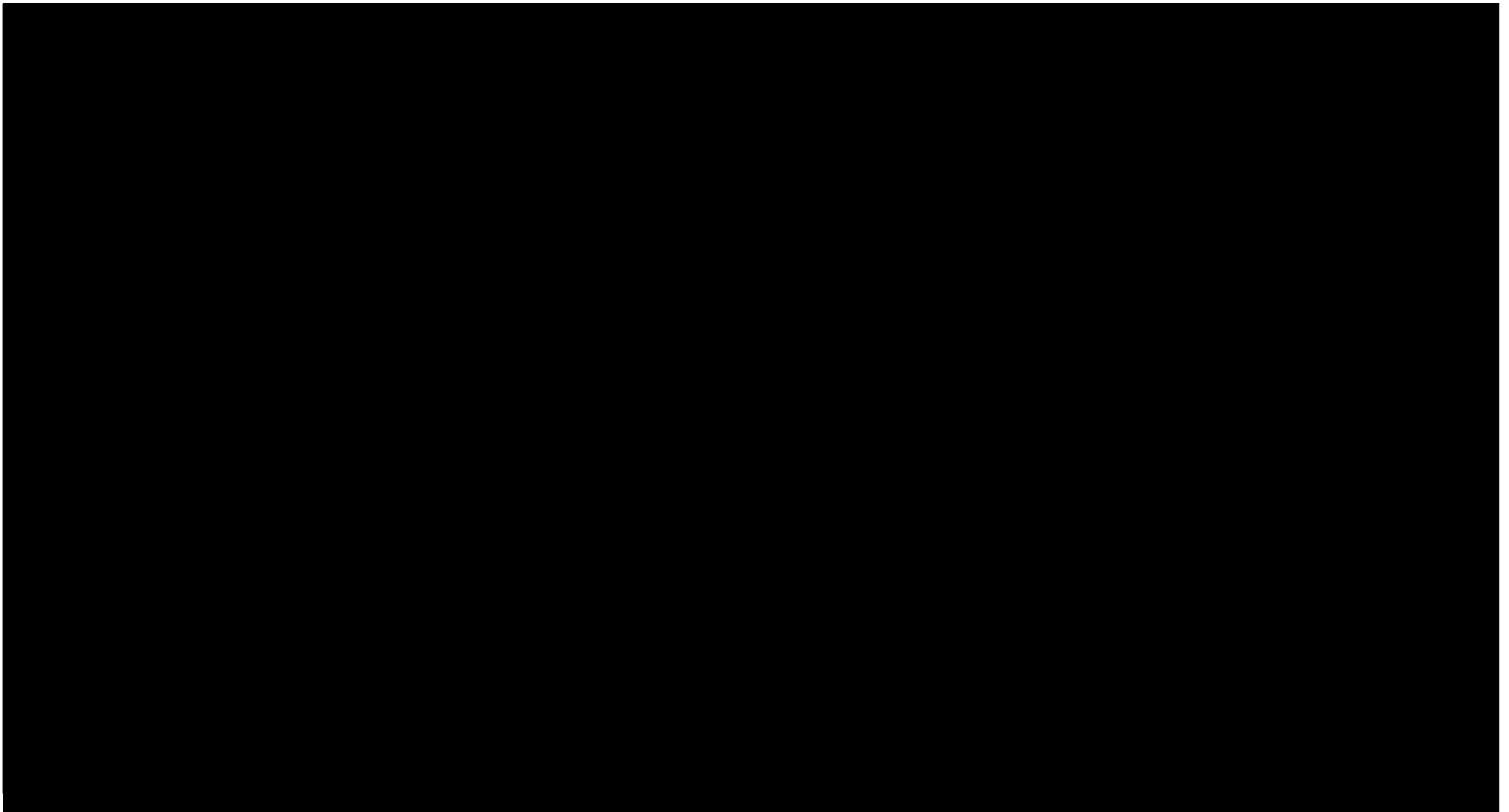


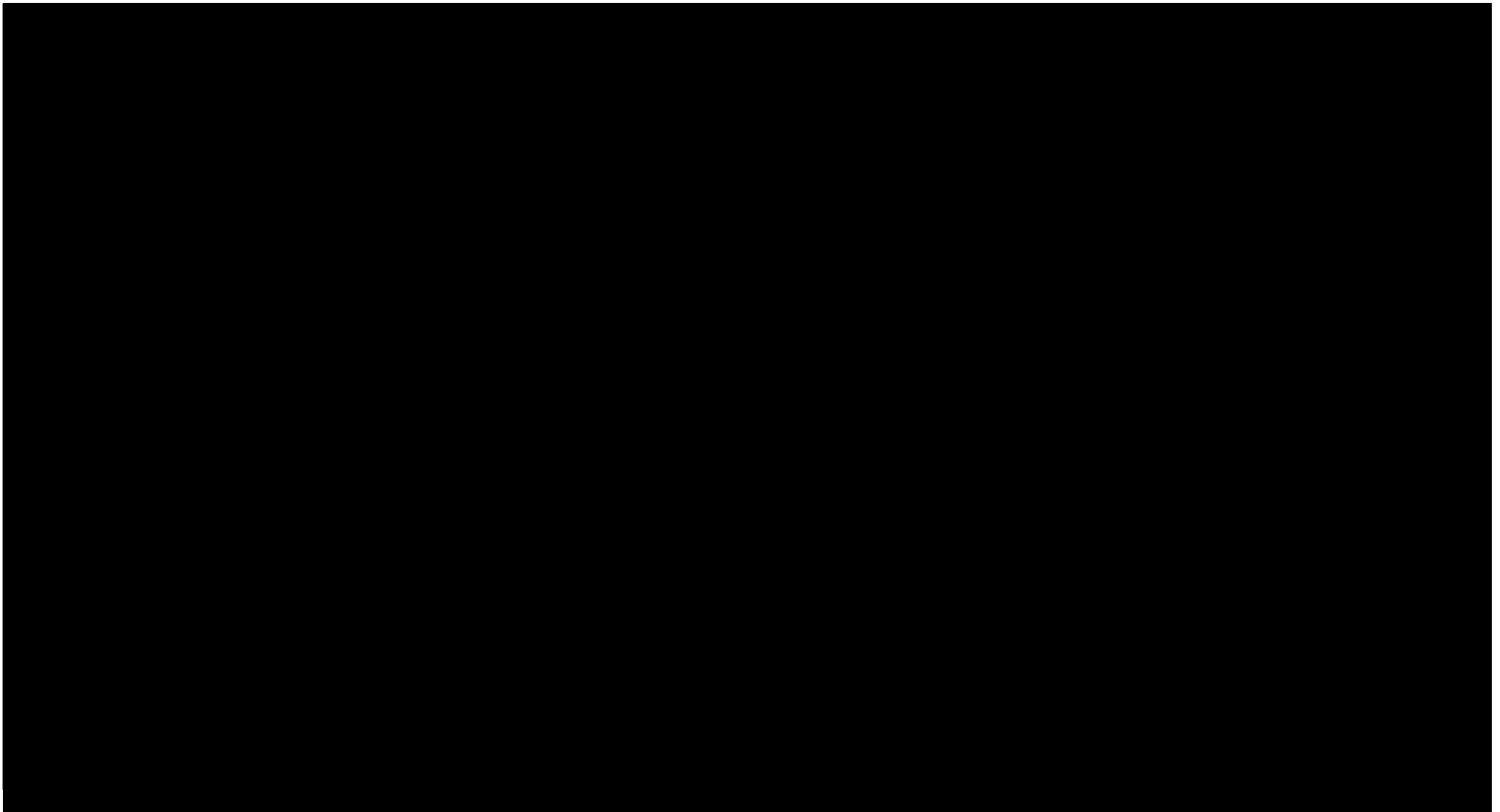


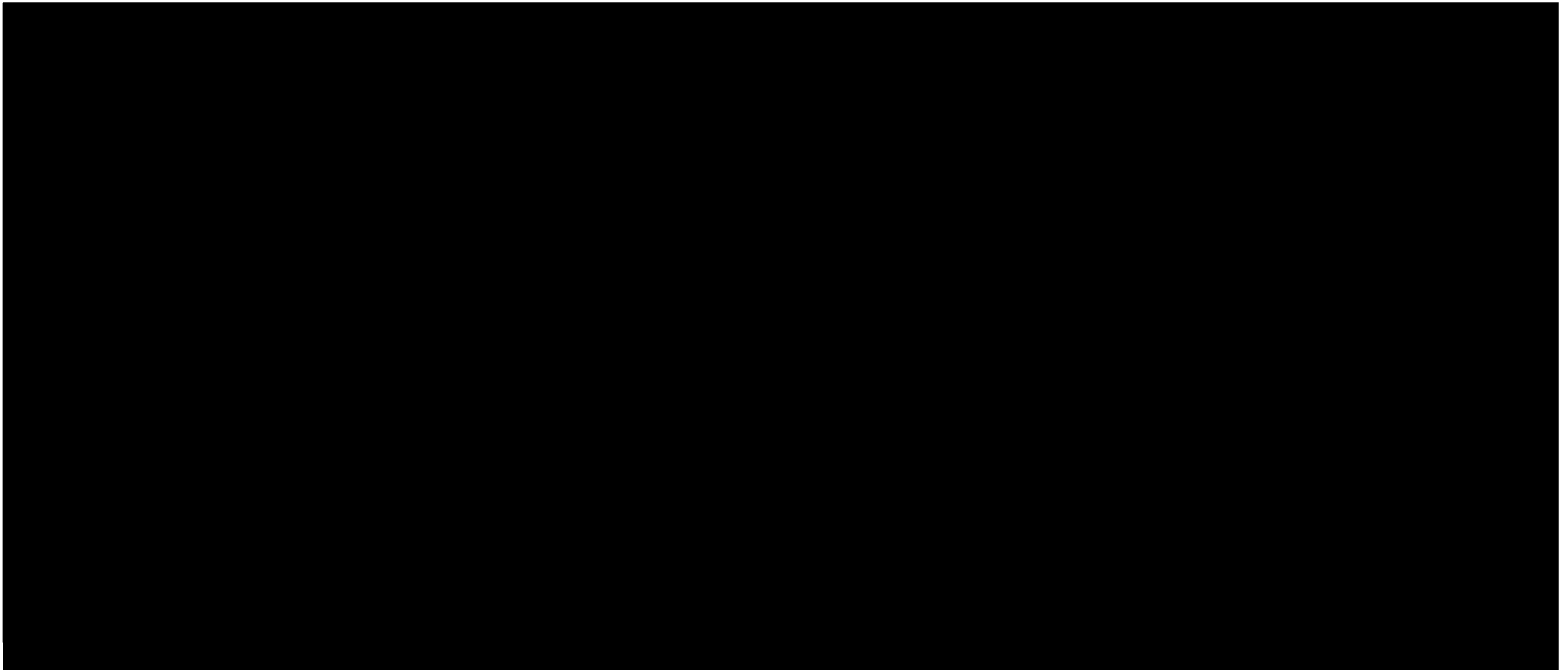












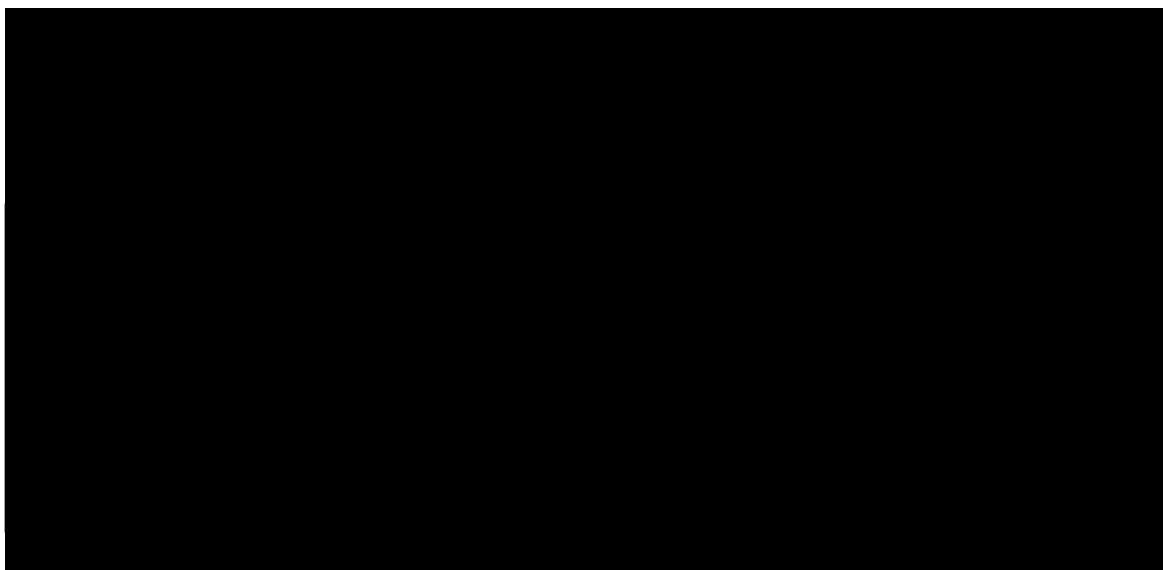


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Singkawang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan RENJA dengan kesepakatan hasil musrenbang Kota di Kecamatan.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat disajikan pada tabel dibawah ini :





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah:

Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi : 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.



Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen pendudukan;
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut ditetapkan untuk memecahkan permasalahan yang timbul, serta untuk mencapai Sasaran yang menjadi Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2018-2022,



dengan **Visinya** yaitu **“SINGKAWANG HEBAT 2022”** dan untuk terealisasinya **Misi ke 4** yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi** sesuai dengan Program Prioritas yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2022, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan tujuan ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Untuk mewujudkan tujuan ***”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”*** maka ditetapkan sasaran ***Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***



Sebagai indikator keberhasilan pencapaian atas tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK);
2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik;
3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;
4. Rasio Kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA);

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Keterbacaan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	90%	92%	94%	96%	100%
		2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP}} \times 100\%$	80%	83%	87%	92%	97%
		3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%
		4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)}}{\text{Jumlah penduduk usia < 17 Tahun}} \times 100\%$	0	30%	40%	50%	70%



3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 adalah tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2018-2022.

1. Program

Adapun program yang akan dilaksanakan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka tahun 2022 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- ✓ Pengadaan Mebel;
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pendaftaran Penduduk meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;

- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- ✓ Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

3) Program Pencatatan Sipil meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;

- ✓ Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- ✓ Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil



4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;

- ✓ Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- ✓ Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

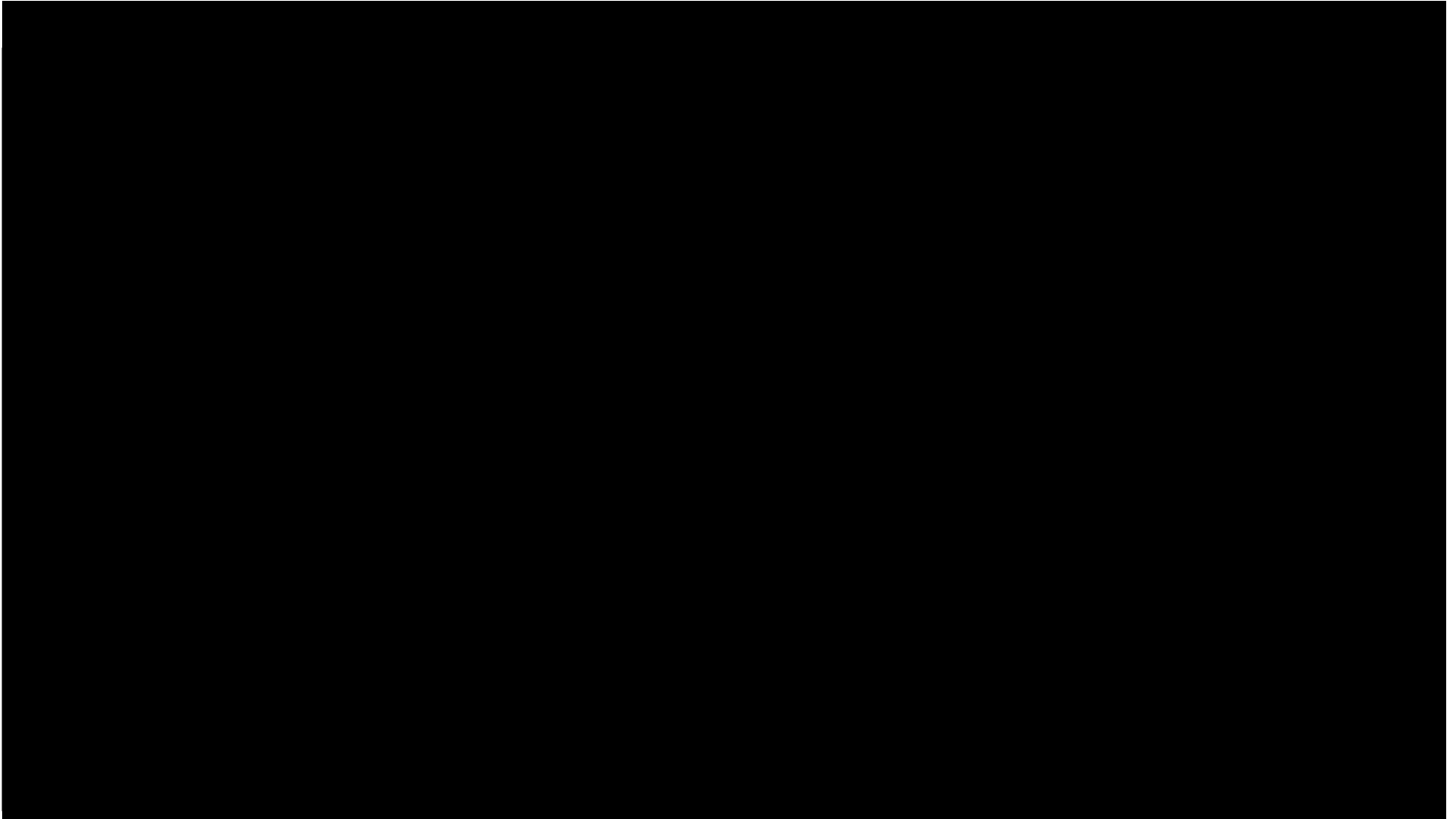
- ✓ Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- ✓ Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- ✓ Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

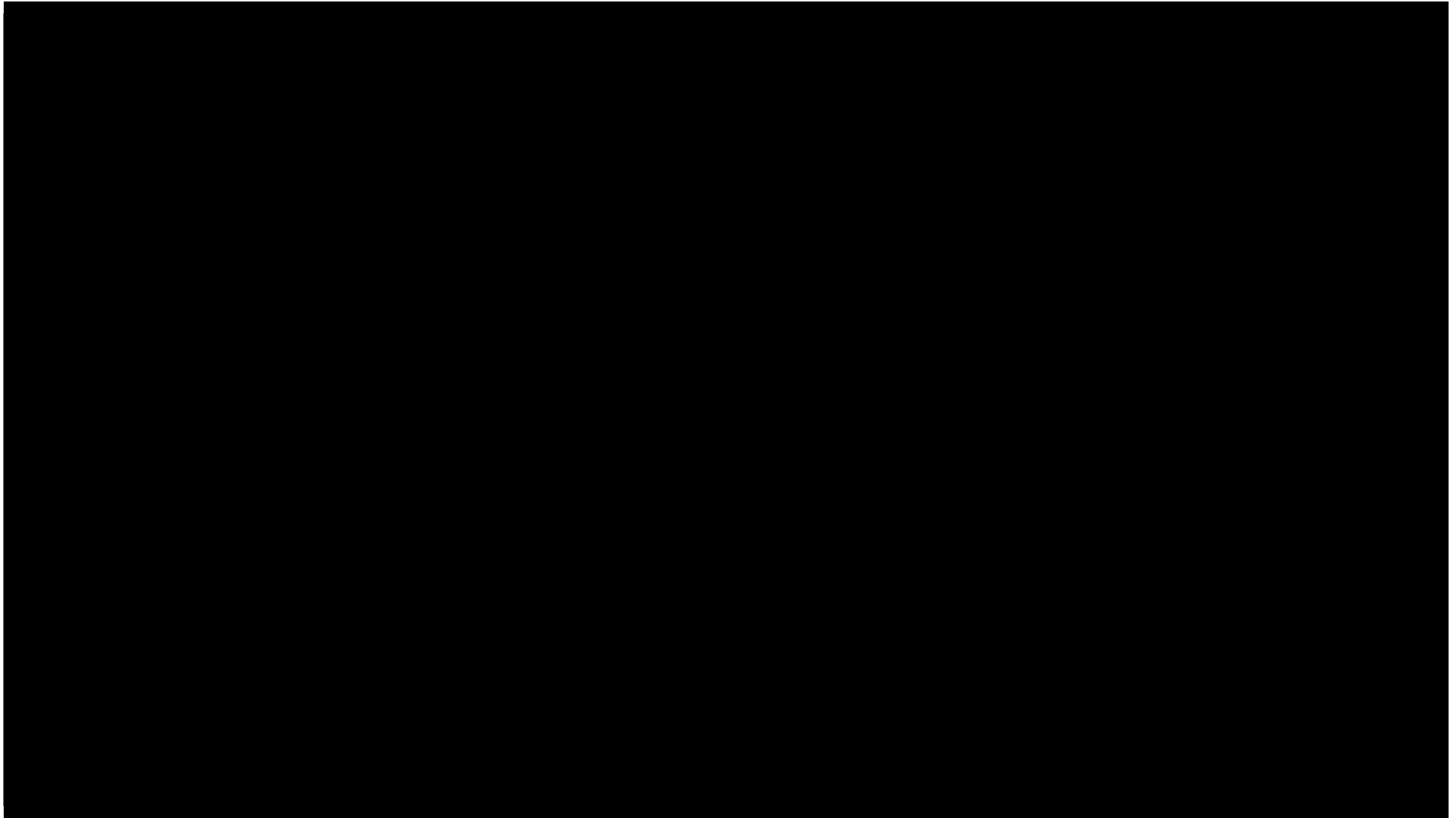
5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan meliputi kegiatan :

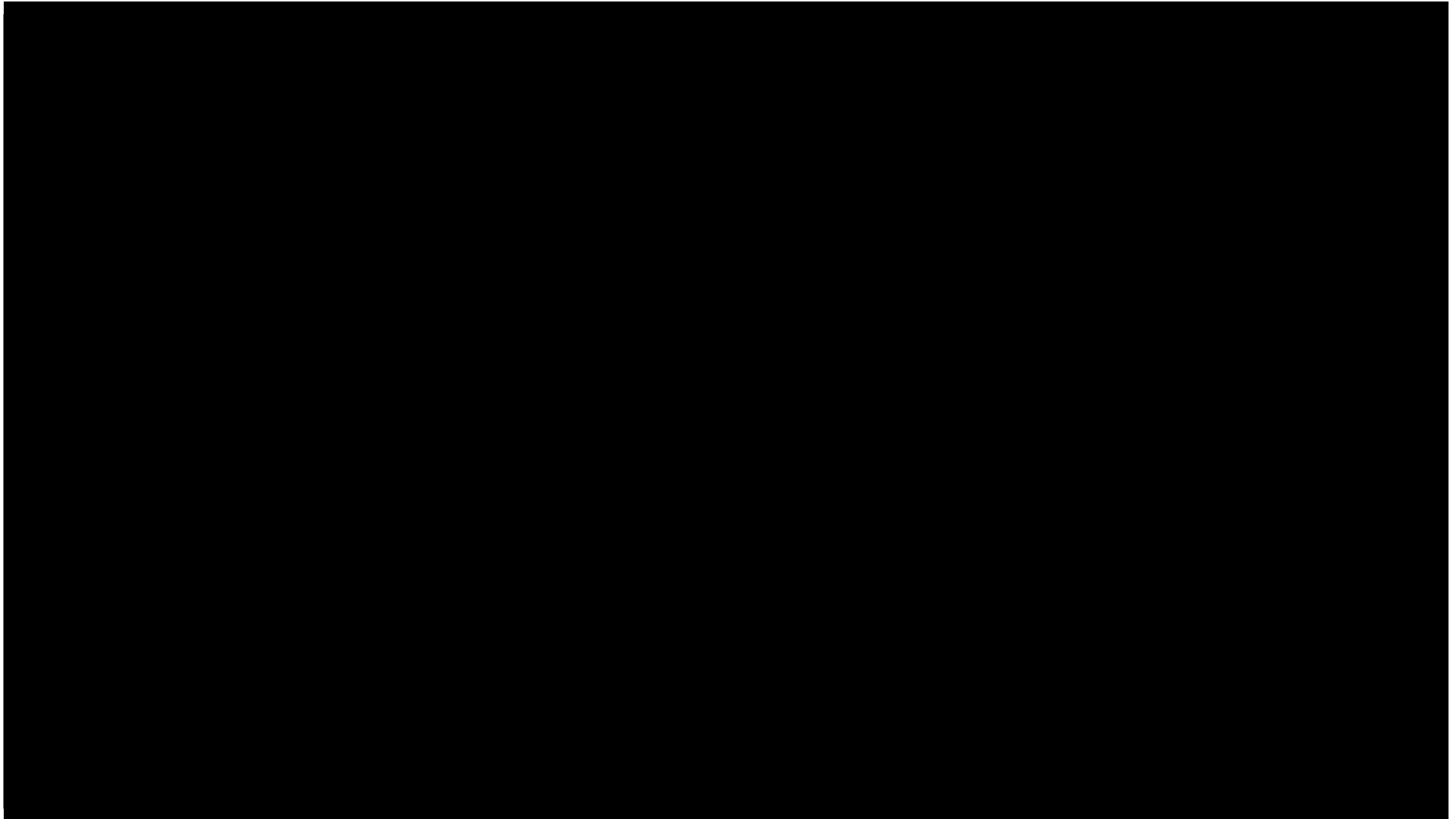
a. Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan;

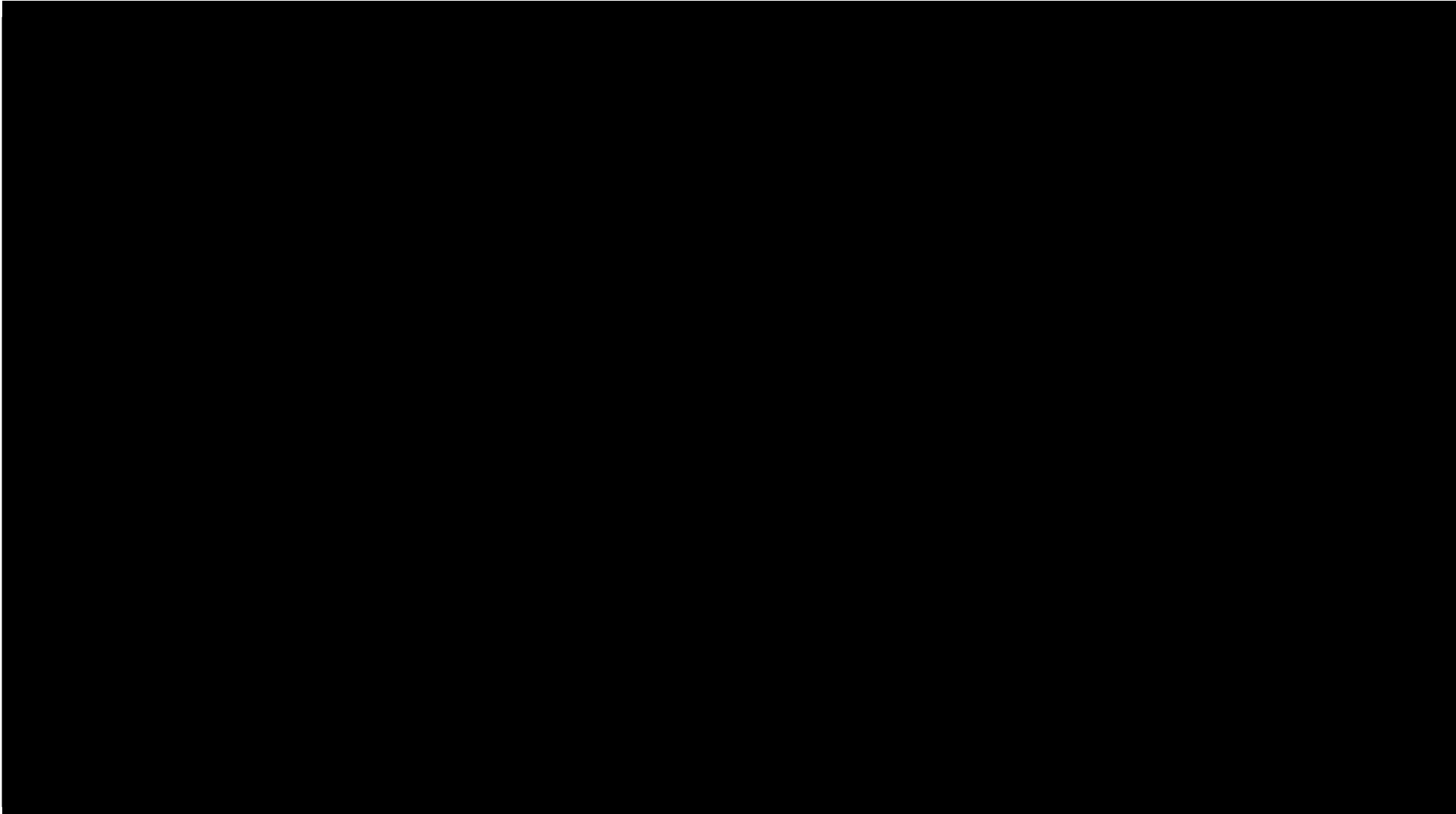
- ✓ Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota.
- ✓ Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

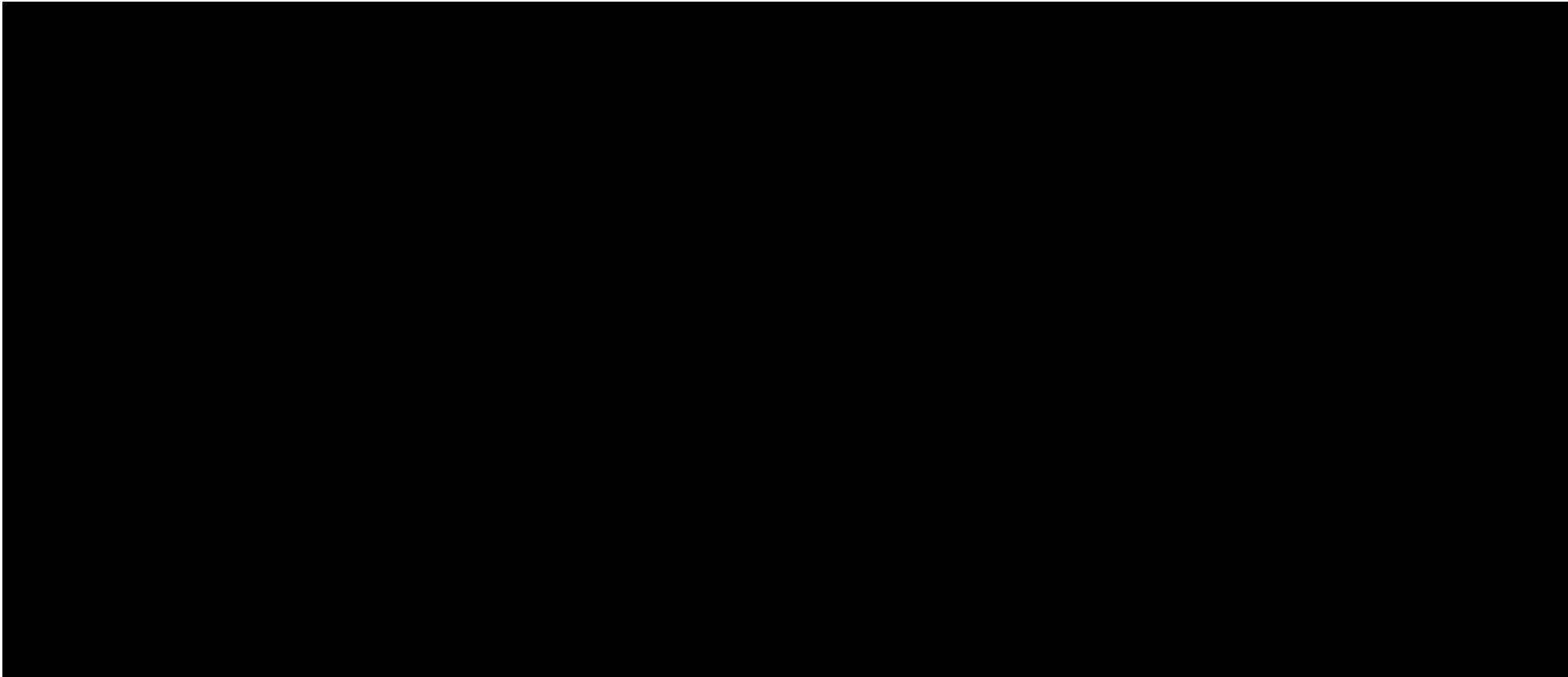
Secara garis besar Rumusan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah ini.













BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2022, tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2022 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2022 kami sajikan pada tabel berikut ini :



RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

N O	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			ORGANISASI	PAGU INDIKATIF			LOKASI
				KELUARAN	HASIL	TARGET		APBD KOTA	APBD PROV	DAK	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.269.331.500,00		937.406.000,00	
1	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.859.355.188	0	937.406.000	
1	2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah					18.000.000	0	189.836.720	
1.	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja PD	DISDUKCAPIL	4.000.000	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	DISDUKCAPIL	4.000.000	0	0	Disdukcapil
3.	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penduduk yang melakukan perekaman KTP-elektronik dan Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Reormasi Birokrasi	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	5.000 Orang dan 1 Kali (PMPRB)	DISDUKCAPIL	10.000.000	0	189.836.720	Kota Skw
2	2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.071.173.401	0	0	
1.	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23 Orang	DISDUKCAPIL	2.943.833.401	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	DISDUKCAPIL	122.340.000	0	0	Disdukcapil
3.	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	DISDUKCAPIL	5.000.000	0	0	Disdukcapil



3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	0	35.399.989	
1.	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110 Orang	DISDUKCAPIL	0	0	35.399.989	Kota Skw
4	2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					418.387.571	0	712.169.291	
1.	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	DISDUKCAPIL	33.705.019	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan terhadap Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Urusan Kantor	Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	DISDUKCAPIL	221.840.000	0	532.589.291	Disdukcapil
3.	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	DISDUKCAPIL	17.750.000	0	0	Disdukcapil
4.	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	DISDUKCAPIL	4.000.000	0	0	Disdukcapil
5.	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sebagai Penunjang Kelancaran tugas	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	DISDUKCAPIL	141.092.552	0	179.580.000	Disdukcapil
5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					425.510.910		0	
1.	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(39 Unit) Meja rapat 8 Unit, Kursi Rapat Futura 405 30 Unit, dan Kursi Tamu 1 Unit	DISDUKCAPIL	77.665.830	0	0	Disdukcapil



2.	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Penunjang Kelancaran tugas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(18 Unit) Printer KIA 2 Unit, Printer KTP-el 2 Unit, AC 2 PK 4 Unit, Printer Epson 5 Unit, Komputer PC All in One 3 Unit, Laptop Core I7 HP 2 Unit	DISDUKCAPIL	347.845.080	0	0	Disdukcapil
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					806.376.306		0	
1.	2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DISDUKCAPIL	28.550.000	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Fasilitas Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DISDUKCAPIL	247.762.856	0	0	Disdukcapil
3.	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DISDUKCAPIL	530.063.450	0	0	Disdukcapil
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					119.907.000		0	
1.	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DISDUKCAPIL	69.240.000	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39 unit	DISDUKCAPIL	26.667.000	0	0	Disdukcapil
3.	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Usia Pakai Gedung dan Bangunan kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DISDUKCAPIL	24.000.000	0	0	Disdukcapil
8	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					0		0	



1.	2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Laporan Hasil Survey kepuasan Masyarakat	Jumlah Buku Laporan Hasil survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	DISDUKCAPIL	0	0	0	Disdukcapil
2.	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik Persentase jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persentase jumlah penerbitan KTP elektronik Persentase jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)					55.567.290	0	0	
1	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk					55.567.290	0	0	
1.	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Layanan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Kependudukan	Jumlah penduduk yang melakukan Perekaman KTP-el, Jumlah KK, KTP-el dan KIA yang diterbitkan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 6.000	DISDUKCAPIL	24.803.630	0	0	
2.	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Meningkatnya Layanan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa Perubahan Biodata Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK dan KTP-el Perubahan Biodata	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.505 KK, 940 KTP-el dan 400 KIA	DISDUKCAPIL	15.707.220	0	0	
3.	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Meningkatnya Layanan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK, KTP-el Pindah Datang dan Pindah Keluar	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	KK Pindah Datang 3.030, KK Pindah Keluar 1.050 dan KTP-el Pindah Datang 1.015	DISDUKCAPIL	15.056.440	0	0	
3.	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran, Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian, Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan, Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian					53.659.022	0	0	



1	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil					53.659.022	0	0	
1.	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	615 Dok atas perkawinan, 19 Dok Akta Perceraian 162 Dokumen Akta Perubahan Status Anak, 3 Dok Dwi Kewarganegaraan / Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan 20 Dok Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya)	DISDUKCAPIL	27.322.233	0	0	
2.	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	4.795 Dokumen Akta Kelahiran, 175 Dokumen Akta Kematian dan 255 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta Kelahiran)	DISDUKCAPIL	26.336.789	0	0	
4.	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Database Kependudukan yang dibersihkan					286.750.000	0	0	
1	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dapat di Akses oleh Pengguna dan Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah					236.750.000	0	0	
1.	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Meningkatnya pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	DISDUKCAPIL	230.250.000	0	0	
2.	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama	Persentase Penyajian Data Kependudukan	5 Lembaga Pengguna	DISDUKCAPIL	6.500.000	0	0	



2	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan Data, Informasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan					50.000.000		0	
1.	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	1 Inovasi	DISDUKCAPIL	40.000.000	0	0	
2.	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tentang Pentingnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	-	DISDUKCAPIL	0	0	0	
3.	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Tersusunnya Buku Laporan Statistik Kependudukan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Buku Data Penduduk Persemester Hasil Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2021	Jumlah Laporan Buku Statistik Kependudukan dan Buku Data Penduduk Persemester Hasil Data Hasil Konsolidasi Bersih (DKB)	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	14 Buku	DISDUKCAPIL	10.000.000	0	0	
3	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0	0	0	
1.	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	Kota Skw	0	0	0	



5.	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Perkembangan Kependudukan					14.000.000	0	0	
4	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil kependudukan	Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan					14.000.000	0	0	
1.	2.12.5.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang diakses oleh Lembaga Pengguna	Persentase Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang	2 Laporan	DISDUKCAPIL	10.000.000	0	0	
2.	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang yang disusun	Persentase Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang	1 Buku	DISDUKCAPIL	4.000.000	0	0	
TOTAL								5.269.331.500	0	937.406.000	6.206.737.500



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dengan demikian ada keselarasan antara setiap dokumen perencanaan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan. Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak serta dukungan anggaran yang memadai. Dengan Rencana Kerja ini diharapkan agar seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Singkawang dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan adil.

Singkawang, 2 Juni 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Singkawang



DESON LINGGA, SH
NIP. 19630110 198303 1 008